
**Implementasi Kebijakan Kebun Raya Megawati Soekarnoputri Sebagai
Kawasan Konservasi Tumbuhan Di Kecamatan Ratatotok**

**Marcho G.R. Pomatu¹
Herman Nayoan²
Stefanus Sampe³**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Implementasi Kebijakan Kebun Raya Megawati Soekarnoputri sebagai kawasan konservasi tumbuhan di Kecamatan Ratatotok. Salah satu Program Kebijakan Pemerintah yang perlu di sorot terkait konservasi alam saat ini, ialah rencana pembangunan Kebun Raya di tiap-tiap Daerah. Program pembangunan Kebun Raya Daerah merupakan salah bentuk aktualisasi tugas dan fungsi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pembangunan Kebun Raya Daerah menjadi salah satu kebijakan Pemerintah dalam upaya menanggulangi serta merehabilitasi kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kebun Raya yang salah satu fungsinya sebagai wadah Konservasi Tumbuhan di Kecamatan Ratatotok masih belum berhasil di implementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan kebijakan yang sudah di sahkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Nilai Konservasi Yang harus di jalankan sebaik mungkin sebagai bagian dari fungsi Kebun Raya, malah menjadi bagian yang kurang di perhatikan implementor.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kebun Raya, Konservasi Tumbuhan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Peraturan perundangan yang berdampak besar dalam percepatan pembangunan Kebun Raya Daerah selama 10 tahun terakhir adalah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya. Perpres ini menjadi dasar bagi Kementerian PUPR dan Kementerian lain untuk mendukung pembangunan Kebun Raya Daerah sesuai tuis masing-masing. Di daerah, Perpres ini menjadi landasan yang cukup kuat bagi Kepala Daerah untuk mengajukan pendanaan kepada DPRD dalam pengelolaan kebun raya. Sebagai penjelasan Perpres ini, selanjutnya dibentuk peraturan perundangan satu tingkat di bawahnya oleh Kepala LIPI, baik yang bersifat atributif (kewenangan langsung) maupun delegatif (yang disebut langsung dalam Perpres). Peraturan atributif pertama yang dibentuk adalah Peraturan Kepala LIPI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kebun Raya Pasal 1 ayat (9) Kebun Raya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Kebun raya yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Peraturan Kepala LIPI Nomor 10 tahun 2015 ini menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pengelolaan Kebun Raya di Daerah. Sementara Peraturan delegatif yang disebutkan dalam Pasal 5 Perpres Nomor 93 Tahun 2011, yaitu Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pengembangan Kebun Raya Indonesia Pasal 2 Rencana Pembangunan Kebun Raya Indonesia digunakan sebagai pedoman dalam penetapan lokasi pengembangan Kebun Raya di Indonesia.

Di Kabupaten Minahasa Tenggara, tepatnya di Kecamatan Ratatotok terdapat juga objek kebun raya yang dulunya merupakan lahan galian tambang emas dari PT. Newmont Minahasa Raya (NMR). PT. NMR bersama dengan Pemerintah setempat sepakat untuk membangun lahan bekas tambang menjadi area rehabilitasi bagi aset tanaman asli daerah tersebut. Rencana pembangunan ini mendapat titik terangnya ketika di keluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Kebun Raya Megawati Soekarnoputri yang menjadi awal pembangunannya Kebun Raya Daerah yang di namakan Kebun Raya Megawati Soekarnoputri di bawah wewenang Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian dalam urusan pengelolaan Kebun Raya ini, maka di keluarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 55 tahun 2017 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Megawati Soekarnoputri pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara. Yang dimana dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi "UPTD Kebun Raya Megawati Soekarnoputri di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang di berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Lingkungan Hidup" kemudian di dalam ayat 2 berbunyi "UPTD Kebun Raya Megawati Soekarnoputri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam urusan konservasi ex-situ tumbuhan Pamah kawasan Wallacea". Ikon tumbuhan yang di pilih adalah "leilem" Secara tradisional jenis

ini telah digunakan sebagai obat dan telah menunjukkan adanya kandungan senyawa polifenol yang berpotensi memiliki aktivitas antioksidan.

Observasi awal yang dilakukan oleh penulis terkait Kebun Raya Megawati Soekarnoputri, di dapati ada beberapa masalah yang terjadi soal pengelolaan Kebun Raya ini. Adapun beberapa indikasi terjadinya kerusakan dari koleksi tumbuhan dalam zona Kebun Raya yang merujuk pada masih maraknya aktifitas pertambangan liar di daerah sekitar Kebun Raya hingga ada masyarakat yang nekat melakukan aktifitas pertambangan di dalam daerah Kebun Raya. Dimana hal ini berkaitan juga dengan minimnya Pengawasan oleh pengelola Kebun Raya sehingga masih ada saja masyarakat yang nekat melakukan aktifitas pertambangan liar di daerah tersebut. Yang menjadi asumsi awal penulis juga terkait minimnya pengawasan di kebun raya oleh UPTD adalah kemampuan pegawai UPTD dalam menyingkapi penambang liar yang bisa saja mencelakai pegawai UPTD.

Berangkat dari tujuan di bangunnya kebun raya yang tertuang dalam Peraturan Presiden no 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya. Pemanfaatan kawasan Kebun Raya juga meliputi kegiatan wisata yang dalam aktualisasinya, kurang mendapat fasilitas dan infrastruktur pendukung untuk memenuhi kenyamanan dari orang-orang yang ingin berwisata di Daerah Kebun Raya. Tingginya minat masyarakat dalam kegiatan pertambangan juga menjadi masalah tersendiri karena beberapa kendaraan bermotor yang di pakai masyarakat untung kebutuhan transportasi ke daerah pertambangan, seringkali memenuhi daerah yang seharusnya menjadi akses masuknya

area Kebun Raya ini sehingga dapat di nilai kurang kondusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Fokus Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Kebun Raya sebagai Kawasan Konservasi Tumbuhan di Kecamatan Ratatotok. Fokus penelitian ini menitikberatkan melalui teori dari George C. Edward III (Nawawi, 2009:138) di dalam Irsanya (2015:16) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Comunication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumber Daya)
3. *Disposition* (Disposisi)
4. *Bureaucratic Structure*

(Struktur Birokrasi

Informan adalah orang yang menjadi narasumber atau sumber dalam penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi dari latar penelitian. Untuk itu perlu ditentukan narasumber untuk penelitian ini yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara
2. UPTD Kebun Raya Megawati Soekarnoputri
3. Masyarakat pengunjung Kebun Raya
4. Masyarakat Penambang
5. Kepala Desa di Kecamatan Ratatotok

Dalam pengumpulan data dilapangan, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara
2. Daftar Wawancara
3. Dokumentasi

Hasil Penelitian

a Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapati di lapangan lewat wawancara dengan beberapa informan di lapangan, dimana dinas lingkungan hidup sudah dengan baik menerapkan fungsi komunikasi kepada masyarakat dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan adanya kebun raya di Kecamatan Ratatotok. penerapan kebun raya sendiri yang menurut fungsinya sendiri yang di curahkan dalam peraturan daerah No 15 tahun 2015 berbunyi bahwa jalannya Fungsi dari Kebun Raya Megawati Soekarnoputri meliputi pendidikan, penelitian, konservasi serta pariwisata. Lewat data di lapangan bahwa dalam sosialisasi yang di laksanakan menekankan tentang fungsi pariwisata yang menguntungkan bagi masyarakat di mana beberapa keuntungan dengan adanya fungsi pariwisata yaitu masyarakat bisa menjual kebutuhan-kebutuhan bagi pengunjung yang datang berwisata ke kebun raya, dan dengan menjalankan fungsi pariwisata ini dapat menunjang perekonomian masyarakat setempat.

Namun menurut peneliti berdasarkan data di lapangan, pola komunikasi seperti ini masih kurang tepat jika di hadapkan dengan situasi kebun raya yang masih belum seratus

persen berjalan, karena belum rampungnya kebun raya dengan identitasnya sebagai aset yang utuh mewadahi fungsi awalnya sebagai wadah konservasi. Fungsinya sebagai pariwisata belum bisa di aplikasikan secara komersil mengingat masih awamnya masyarakat tentang pentingnya konservasi secara berkala demi melindungi aset tumbuhan di dalam Kebun Raya.

Pada dasarnya kebun raya sebagai kawasan konservasi harus di pertegas dulu nilainya pada masyarakat, bahwa ada tumbuhan-tumbuhan yang harus di lindugi dengan metode konservasi ex-situ yang menjadi pilihan konservasi di Kebun Raya Megawati Soekarnoputri. Sehingga ketika kesadaran masyarakat tentang konservasi sudah matang baru bisa di terapkan pola asuh sosialisasi yang mengedapankan nilai pariwisata yang lebih komersil tanpa mengorbankan aset yang di konservasi.

Berikut mengenai sosialisasi yang di jalankan oleh kepala UPTD pada masyarakat yang tidak di lakukan secara tatap muka dengan masyarakat dan hanya menggunakan media sosial sebagai media yang di gunakan sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat, hal ini di dukung dengan keterangan dari Kepala Desa Ratatotok Tenggara mengenai sosialisasi yang masih bergantung di media sosial.

Menurut Peneliti masih kurang maksimal jika sosialisasi di jalankan dengan metode daring lewat media sosial, mengingat bahwa media sosial belum bisa mencakup setiap orang yang ada di kecamatan Ratatotok karena masih kurangnya orang yang menggunakan media sosial serta kepadatan informasi di media sosial begitu cepat dan masif sehingga bisa

saja tidak tersampaikan pada semua orang.

Selanjutnya mengenai komunikasi antara Kepala Dinas dan Kepala UPTD yang menjadi salah satu indikasi masalah yang ada dalam pengambilan keputusan yang menurut peneliti terlalu otoriter dalam mengambil keputusan. Peneliti melihat komunikasi antara Kepala Dinas dan Kepala UPTD tidak berjalan dengan baik berdasarkan keterangan dari Kepala UPTD dengan salah satu masyarakat yang menjadi tenaga keamanan di Kebun Raya Megawati Soekarnoputri. Satu hal yang menjadi faktor pendukung tidak berjalan baiknya komunikasi antara Kepala Dinas dan Kepala UPTD ialah perbedaan cara pandang pengelolaan Kebun Raya yang tidak di sikapi dengan diskusi lebih lanjut atau musyawarah untuk mufakat demi mencari jalan terbaik dalam pengelolaan Kebun Raya, mandeknya komunikasi antar Kepala Dinas dan Kepala UPTD mengakibatkan kemunduran dalam pengambilan keputusan dari Kepala UPTD karena sering tidak sesuai dengan kemauan Kepala Dinas.

Sehingga sesuai informasi, data dan fakta di lapangan dapat di simpulkan peneliti bahwa dinamika Komunikasi dalam implementasi kebijakan Kebun Raya, masih belum tepat karena bahasa dan pola komunikasi yang masih belum memberikan penekanan dalam menjamin jalannya fungsi konservasi di Kebun Raya Megawati Soekarnoputri. Kinerja Sosialisasi pun masih kurang maksimal karena dasar komunikasi kepada masyarakat merupakan hal yang krusial dalam penerapan kebijakan Kebun Raya ini. Adapun masalah komunikasi antara Kepala Dinas dan Kepala UPTD yang menjadi bahasan krusial dalam implementasi

kebijakan ini, kedudukan Kepala UPTD dan Kepala Dinas yang tumpang tindih memberikan dampak pada komunikasi antara kedua pihak menjadi berat sebelah dan pemberian pendapat cenderung hanya satu arah. Maka peneliti menyimpulkan bahwa Komunikasi yang di jalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Tenggara dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tidak maksimal. Maka perlu ditingkatkan dan lebih di maksimalkan lagi mengenai kualitas dalam pola komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Tenggara dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan cara turun langsung kepada masyarakat dan memberikan sosialisasi yang tepat pada masyarakat.

b Sumber Daya

Sumber Daya adalah salah satu penunjang terlaksananya sebuah Kebijakan, sumber daya merupakan kebutuhan-kebutuhan yang akan di perlukan dalam menjalankan kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah di rencanakan. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah lakukan terkait sumber daya yang menjadi salah satu aspek berjalannya Implementasi Kebijakan ini. Lewat wawancara dengan beberapa informan di lapangan, di dapati bahwa pengimplementasian sumber daya manusia masih belum terpenuhi dan belum sesuai dalam mengelola Kebun Raya Megawati Soekarnoputri. Di mana, dalam UPTD sendiri tenaga pegawai masih belum terisi sepenuhnya sesuai struktur

organisasi yang ada. Hal ini pun di perburuk dengan masih minimnya pemberian pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya manusia itu sendiri.

Berdasarkan data di lapangan, sumber daya dalam bentuk bangunan yang sudah di bangun di Kebun Raya Megawati Soekarnoputri demi menunjang jalannya Fungsi-Fungsi di Kebun Raya sendiri di nilai sudah tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Adapun beberapa indikasi masalah yang menjadi penilaian utama bahwa sarana-prasarana di Kebun Raya sudah tidak layak pakai ialah karena beberapa bangunan itu sendiri tidak memiliki pasokan listrik demi menunjang jalannya fungsi administrasi yang berdasarkan teknologi informasi serta minimnya pemeliharaan bangunan-bangunan sebagai penunjang jalannya kebijakan.

Berdasarkan observasi langsung dari peneliti, beberapa bangunan sebagai fungsi konservasi sudah tidak layak pakai karena struktur bangunan yang sudah tidak lengkap serta faktor pembangunan area konservasi yang kurang memperhatikan lingkungan sekitar sehingga sering merembes dan tergenang air ketika musim hujan. Jika melihat dari Faktor Sumber Daya Finansial sendiri masih terkendala dengan situasi pandemi yang dalam penganggarannya masih berfokus pada masalah penanggulangan dampak pandemi di Daerah Minahasa Tenggara. Namun, perlu diperhatikan juga bila berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan terkait anggaran operasional masih besar kekurangannya jika di tarik dari permasalahan sosialisasi yang masih membutuhkan penganggaran demi menjalankan sosialisasi dengan tepat seperti menggunakan media sosialisasi yang lebih berbentuk fisik

seperti pembuatan selebaran ataupun baliho. Satu hal juga yang perlu di perhatikan terkait dana operasional ialah masih belum adanya penganggaran untuk Listrik di area Kebun Raya bahkan di Kantor Utama Kebun Raya Megawati Soekarnoputri. Hal ini juga menjadi salah satu faktor mengapa banyak sarana-prasarana yang rusak atau hilang seperti panel solar untuk penerangan, struktur net untuk sarana pembudidayaan serta beberapa bangunan lain.

Jadi berdasarkan dari hasil wawancara di dapati bahwa Konservasi Tumbuhan di Kebun Raya Megawati Soekarnoputri masih belum di dukung dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia yang optimal untuk mendukung kebutuhan Konservasi, lebih lanjut lagi dalam dinamika pengelolaan Kebun Raya dalam memenuhi kebutuhan sarana-prasarana masih belum sesuai untuk menjalankan Kebun Raya secara optimal dan proyek pembangunan yang seakan-akan mangkrak di tengah jalan. Dalam memenuhi kebutuhan finansial pun masih belum sesuai dengan keperluan Kebun Raya. Sehingga dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya manusia masih sangat kurang dan tidak tepat serta masih perlu biaya operasional yang cukup untuk menunjang segala kebutuhan di Kebun Raya.

c **Disposisi**

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Dalam penerapan kebijakan Kebun Raya megawati soekarnoputri ini, satu hal yang kontroversial terkait penerapannya ialah maraknya penambangan liar di daerah Kebun Raya. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi yang harus di hadapi pelaksana karena lahan kebun raya yang memang merupakan area ex galian tambang PT. Newmont Minahasa Raya masih mengandung kandungan emas di dalamnya. Untuk menilik terkait hal ini, berdasarkan observasi dan data di lapangan, di dapati bahwa sudah ada gerakan yang baik dari pelaksana kebijakan ketika sudah ada penertiban-penertiban penambang liar di Kebun Raya, namun dalam komitmen untuk pengembangan kebun raya lebih khusus untuk gerakan konservasi di kebun raya dapat di katakan masih minim. Hal ini di dukung dengan sudah tidak adanya master plan Kebun Raya Megawati Soekarnoputri yang menjadi dasar konsep Pembangunan Kebun Raya. Kemudian minimnya pengawasan serta luasnya daerah Kebun Raya, maka belum adanya bangunan pagar yang solid menjadi masalah ketika masih banyaknya penambangan di area Kebun Raya. Lambatnya pembangunan ini menjadi salah satu masalah mengapa sudah banyak bangunan yang rusak dalam kebun raya. Kemudian dalam komitmen Implementor dalam menjalankan pengamanan di lokasi Kebun Raya, kegiatan pengamanan di Kebun Raya terbilang berhasil mengurangi penambang-penambang liar yang menambang di kawasan Kebun Raya. Hal ini lumayan efektif karena dalam kegiatan pengamanan ini pemerintah setempat menggandeng TNI dan Polisi setempat untuk menyidik penambang-penambang di kawasan Kebun Raya, namun walaupun sudah ada beberapa

kali pengamanan tetapi masih di dapati penambang-penambang liar di area Kebun raya Megawati Soekarnoputri.

Jadi dapat di simpalkan komitmen pelaksana masih belum maksimal dalam menjalankan konservasi Tumbuhan di Kebun Raya Megawati Soekarnoputri dan dalam perlindungan aset Kebun Raya. Maka, perlu di maksimalkan komitmen pelaksana dalam jalannya program konservasi serta perlindungan aset Kebun Raya agar tidak terjadi pembiaran akan aset Kebun Raya.

d Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan.

Dalam menjalankan ketentuan kebijakan di dalam Pengelolaan Kebun Raya Megawati Soekarnoputri masih terdapat masalah-masalah krusial yang harusnya menjadi dasar jalannya kebijakan. Berdasarkan data di lapangan, peneliti menemukan bahwa kondisi struktur pelaksana yang masih belum rampung sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati. Hal ini dapat di lihat dengan masih belum rampungnya struktur Unit Pelaksana Tugas Daerah Kebun Raya Megawati Soekarnoputri yang hanya berisikan Kepala UPTD saja tanpa adanya bagian pendukung lainnya. Kemudian salah satu aspek penting dalam struktur birokrasi yang penting ialah juga adanya *standard operating procedures* atau SOP yang menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya masih belum ada di dalam struktur birokrasi Kebun Raya Megawati Soekarnoputri. Dengan Belum rampungnya struktur birokrasi di UPTD kebun raya

membuat tidak berjalannya tugas dan fungsi UPTD.

Terkait pengambilan Keputusan dalam pengelolaan Kebun Raya di nilai kurang mempertimbangkan pendapat dari Kepala UPT Kebun Raya dan hanya mengikuti arahan dari Kepala Dinas sedangkan yang menjadi kebutuhan dari Kebun Raya yang harusnya paling mengatahui ialah Kepala UPTD, maka ketika pendapat Kepala UPTD kurang di perhatikan maka di nilai pengambilan keputusan di Kebun Raya tidak memiliki dasar struktural yang baik.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa kondisi Struktur Birokrasi di Kebun Raya Megawati Soekarnoputri masih belum siap dalam menjalankan kebijakan ini sebagaimana yang di amanatkan dalam peraturan tertulis kebijakan ini, dimana karena hal itu terjadi pembiaran akan aset kebun raya. Kontroversi internal pelaksana pula perlu di selesaikan atau di tanggulangi dengan baik agar pengambilan keputusan bisa di laksanakan dengan tepat

Penutup

Kesimpulan

1. Dari aspek Komunikasi yang menjadi faktor penentu kebijakan Kebun Raya Megawati Soekarnoputri, masih belum di laksanakan secara optimal dan belum menempatkan Fungsi Konservasi sebagai bagian yang krusial dalam pelaksanaan Komunikasi secara vertikal pada masyarakat. Komunikasi antar Kepala Dinas dengan Kepala UPTD pun tidak berjalan dengan baik karena masih berbentur dengan penelian masing-masing tanpa adanya *brainstroming* yang optimal.
2. Dari aspek Komunikasi yang menjadi faktor penentu kebijakan

Kebun Raya Megawati Soekarnoputri, kebutuhan sumber daya manusia sebagai bagian dominan dalam menjalankan fungsi Konservasi masih belum di implementasi dengan baik karena masih belum sesuai dengan kebutuhan konservasi yang tepat. Di sisi lain, kebutuhan sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung konservasi sudah tidak memadai untuk mendukung jalannya kebjakan ini apalagi dalam kebutuhan konservasi sarana bangunan konservasi sudah tidak dapat di gunakan kembali karena sudah rusak. Dalam sumber daya finansial pun, penganggaran untuk kebutuhan operasional masih belum bisa mencukupi dalam menunjang segala kebutuhan di kebun raya.

3. Aspek berikut yang menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan Kebun Raya Megawati Soekarnoputri yaitu disposisi, di sini implementor sebagai subjek pelaksana kebijakan di Kebun Raya masih minim dalam memberikan komitmen pada jalannya konservasi di kebun raya, walaupun banyak pengamanan di dalam area kebun raya namun dalam meningkatkan koleksi tumbuhan dalam konservasi masih minim adanya. Hal ini di dukung dengan sudah tidak adanya bagian *master plan* sebagai pedoman kebun raya kedepannya.
4. Kemudian dari Aspek berikut yang menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan Raya yaitu Struktur Birokrasi menjadi perhatian khusus di sini karena menjadi masalah paling krusial dalam penerapan kebijakan ini. *standard operating procedures* atau SOP yang menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya masih belum ada sehingga arah jalannya

pengelolaan Kebun Raya masih tumpang tindih dan akibatnya sering mengalami masalah internal birokrasi. Masih belum rampungnya struktur UPTD Kebun Raya juga menjadi hal penting untuk di perhatikan karena belum sesuai dengan yang di amanatkan oleh peraturan tertulis kebijakan ini sehingga jalannya fungsi UPTD pun masih belum optimal. Terakhir, dalam pengambilan keputusan pun masih terdapat masalah struktural, yang menjadi dasarnya ialah perbedaan pendapat yang tidak di selesaikan dengan baik sehingga akhirnya keputusan yang di keluarkan sering tidak berdasar pada kebutuhan yang tepat bagi kebun raya.

Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang tepat dari implementor dengan menggunakan media fisik seperti baliho dan memberikan informasi terkait penting konservasi tumbuhan pada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dengan benar fungsi konservasi di Kebun Raya.
2. Perlu di jaga pula komunikasi antar instansi agar dapat menjalankan tupoksi masing-masing dengan benar agar dapat mengetahui kewenangan masing-masing pihak demi menjaga tidak terjadinya konflik internal.
3. Perlu di bangun pagar pembatas agar orang tidak bebas masuk di kebun raya.
4. Pembangunan di Kebun Raya perlu di rampungkan seutuhnya agar kebutuhan konservasi dapat berjalan dengan baik.
5. Perlu adanya sumber daya manusia yang tepat dalam menjalankan fungsi konservasi tumbuhan di kebun raya agar kebutuhan konservasi dapat berjalan dengan

benar. Kemudian perlu di berikan pelatihan khusus untuk pegawai-pegawai yang berhubungan khusus dalam jalannya kebijakan kebun raya agar tiap pegawai punya pengetahuan masing-masing tentang kebun raya dan konservasi tumbuhan.

6. Perlu adanya penganggaran yang tepat dalam memenuhi kebutuhan kebun raya, karena masih banyak hal yang perlu di anggarkan seperti listrik serta operasional lainnya.
7. Perlu di perjelas arah tujuan dan komitmen implementor dalam menjalankan pengelolaan kebun raya lebih khusus dalam menjalankan fungsi konservasi agar tidak terjadi pembiaran akan aset Kebun Raya Megawati Soekarnoputri.
8. Dalam pengelolaan kebun raya juga perlu untuk membentuk sebuah *standard operating procedures* atau SOP sebagai acuan jalannya pengelolaan kebun raya. Perlu di rampungkan seutuhnya struktur birokrasi dari UPTD Kebun Raya agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya perlu adanya penyelesaian dalam konflik internal agar keputusan yang di keluarkan dapat di terima dengan baik.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2018. *KEBIJAKAN PUBLIK*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Cresswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *ANALISIS KEBIJAKAN : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Jurnal**
- Lahe, Ridwan. (2021). *Analisis Perkembangan Kebun Raya Massenrempulu Enrekang di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang 2004-2019*. *Phinisi Integration Review*, 4(3), 442-451.
<https://doi.org/10.26858/pir.v4i3.24422>.
- MaulidiaF. (2018). Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). *Jurnal Kesehatan Media Husada*, 6(2), 183-192.
<https://doi.org/10.33475/jikmh.v6i2.37>
- Nanangkong, Inggridyana. Najoan Herman, Liando Daud. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENEGASAN STATUS TANAH PULAU LEMBEH. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 1. No 1 : Unsrat Manado
- Reina Hapsari Ayuningtyas, Shanaz Vindi Setyarini, A. Rahman, (2019). "KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KELURAHAN REJOMULYO KOTA SEMARANG". Departemen Administrasi Publik. Semarang : Universitas Diponegoro
- Sudrajat, Maulidyka Agustyan, Liando Daud, Sampe Stefanus. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN D I KOTA MANADO. *Jurnal Eksekutif*. Vol 1. No 1 : Unsrat manado
- Yuanita, S. K. S., Yaswinda, Y., & Movitaria, M. A. (2022). EVALUASI MODEL CIPP PROGRAM DIKLAT BERJENJANG TINGKAT DASAR UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PENDIDIK ANAK USIA DINI DI KOTA PAYAKUMBUH. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3427-3440.
<https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1340>
- Sumber-sumber Lain**
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya
- Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 tahun 2015 tentang Kebun Raya
- Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 55 tahun 2017 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Megawati Soekarnoputri pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara
- Irsanya, Marizka. (2015). *Implementasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penyandang Disabilitas*. Universitas Medan Area.
- Messawati, Elok Dyah. 2012. "70 Persen Kerusakan Lingkungan akibat Operasi Tambang",
<https://regional.ko>

mpas.com/read/2012/09/28/17313375/70.Persen.Keruskan.Lingkungan.akibat.Operasi.Tambang, diakses pada 02 Desember 2021 pukul 22.28.

Purnomo, Wahyu Danang. (2020). *Review 10 Tahun Pembangunan Kebun Raya di Indonesia*. Warta Kebun Raya Edisi Khusus 18 (1) 1-15. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia : Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya.